

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejadian 9/11 yang mengakibatkan runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) dan juga gedung Pentagon di Amerika Serikat pada 11 September 2001 silam menjadi titik awal pertempuran Amerika Serikat terhadap tindak terorisme. Kelompok teroris yang menjadi incaran Amerika yang saat itu berada di Afghanistan kemudian menjadikan Afghanistan sebagai fokus Amerika dalam *Global War on Terrosim*. (Williams, 2008, p. 90). Lebih tepatnya kejadian yang terjadi di kota New York, Amerika Serikat ini diserang oleh empat atau lima pesawat yang ditabrakkan di tempat-tempat yang berbeda. Sekitar dua pesawat ditabrakkan di gedung World Trade Center (WTC), satu pesawat sengaja dijatuhkan di area Pentagon yang merupakan kantor Departemen Pertahanan AS, satu pesawat jatuh di dekat bandara Somerset County, 13 km sebelah timur Jennerstown, Pennsylvania, dan pesawat satunya lagi jatuh di daerah Shanksville, Pennsylvania (Warsono, 2006, p. 63). Kejadian 9/11 menimbulkan banyak perubahan antara hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan yang semula memiliki hubungan yang cukup kooperatif kemudian menjadi berkonflik bahkan Amerika Serikat sampai menginvasi Afghanistan. Agenda Amerika Serikat untuk memerangi terorisme dapat dijadikan salah satu alasan mengapa Amerika Serikat menginvasi Afghanistan. negara yang terletak di kawasan Asia Tengah itu diduga menjadi negara pemantik dari adanya tindakan terorisme dunia, ini

dikarenakan adanya eksistensi dari Taliban itu sendiri, ditambah lagi Al-Qaeda yang menjadi pelaku utama kejadian 9/11 itu diperkirakan juga bernaung di negara tersebut. Amerika Serikat tidak tinggal diam ketika stabilitas keamanannya terganggu sehingga tidak segan-segan mendatangkan militernya ke Afghanistan untuk menumpas habis jejaring Al-Qaeda. Memang masih terdapat dugaan-dugaan yang menyatakan bahwa kejadian 9/11 ini ada kaitannya dengan pihak di luar dari Al-Qaeda (Widada R. , 2007, pp. 91-94). Pasca kejadian ini, presiden yang kala itu memimpin Amerika Serikat, yaitu George W. Bush menandatangani sebuah dekrit kepresidenan atau juga disebut sebagai *Military Order* yang mendeklarasikan secara resmi bahwa Amerika Serikat berhak untuk menahan, memperlakukan dan mengadili orang asing yang terbukti terlibat dalam tindakan terorisme. Selain itu Bush juga mengeluarkan kebijakan luar negeri yang hingga sekarang dikenal sebagai peperangan terhadap terorisme atau *War on Terrorism* demi melawan kontraterorisme global. Ia bahkan memberika ultimatum “*Every nation in every region now has a decisions to make either you are with us or you are with terrorist.*” Pernyataan itu merefleksikan bagaimana Amerika Serikat pada saat itu sangat berapi-api untuk memberantas terorisme dan menjadi agenda penting Amerika Serikat dalam memerangi terorisme itu sendiri dimanapun mereka berada, terkhususnya di Afghanistan.

Sudah hampir menjelang dua dekade sejak kejadian 9/11 terjadi dan Amerika Serikat sudah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak empat kali yakni George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump dan Joe Biden, dari keempat pemimpin yang berbeda tersebut memiliki perbedaan kebijakan masing-masing

terhadap Afghanistan dalam memerangi terorisme. Pada tanggal 7 Oktober 2001 atas komando langsung oleh Bush, militer mulai menyerang kamp-kamp pelatihan Al Qaeda dan juga instalasi militer Taliban di Afghanistan. Diketahui bahwa Amerika Serikat meluncurkan 15 bom dari darat, serangan udara dan kapal tempur Amerika beserta Inggris menembakkan 50 rudal. Serangan dahsyat tersebut berlangsung selama beberapa jam secara terus menerus (Liputan 6, 2014). Presiden Bush sangat gencar dalam menangani terorisme dan berfokus dengan cara militer yang diterjunkan langsung ke Afghanistan. Diperkirakan selama dua bulan sejak diturunkannya para militer, Amerika Serikat relatif berhasil melumpuhkan Taliban dari pengaruh pemerintahan dan operasional. Bahkan di masa kepemimpinan Barack Obama, AS berhasil merenggut nyawa orang yang menyebabkan kematian ribuan jiwa di Amerika Serikat dalam kejadian 9/11. Diketahui pada tanggal 2 Mei 2011, tim angkatan laut Amerika Serikat (SEAL) melakukan serangan militer atas perintah dari Barack Obama untuk menangkap Osama Bin Laden (Nelson, Barack Obama: Foreign Affairs). Meskipun Osama Bin Laden sudah berhasil ditangkap namun eksistensi Amerika Serikat masih bertahan di Afghanistan dengan alasan tindakan Taliban yang masih meresahkan. Sudah hampir dua dekade Amerika Serikat memiliki agendanya di Afghanistan dengan mengirim pasukan di negara Asia Tengah itu.

Donald Trump memiliki perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Apabila pada presiden terahulu belum ada perjanjian untuk benar-benar berdamai, maka pada kepemimpinan Donald Trump ini terdapat sebuah perjanjian perdamaian yang cukup mengejutkan. Pada masa kepemimpinan Donald

Trump, sebuah harapan untuk perdamaian di Afghanistan tercapai dimana saat Presiden Afghanistan menemui Trump di gedung putih, Trump sempat mengatakan lebih menginginkan jalur dialog daripada peperangan. Trump berkata, jika memilih jalur itu maka Afghanistan bisa terhapus dari muka bumi (Kompas, 2019).

Di akhir tahun 2019, tepatnya di kota Doha, Qatar berlangsung perundingan antara kelompok Taliban dan Amerika Serikat. Pertemuan yang dihadiri oleh masing-masing wakil pihak itu membahas tentang negosiasi damai intra-Afghanistan dan penyelesaian urusan setelah perang, bahkan Trump juga menyatakan bersedia melanjutkan perundingan damai dengan Taliban (CNN, 2019). Sebuah ciutan yang dituliskan Trump pada 8 Oktober 2020 tampaknya memperlihatkan keberhasilan dialog yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam akun pribadi *twitter* miliknya ia mengatakan bahwa pasukan Amerika yang saat ini masih bertugas di Afghanistan harus ditarik dan dipulangkan ke negara asal mereka sebelum hari perayaan Natal dalam rangka mengakhiri konflik militer Amerika selama belasan tahun di Afghanistan (Military Times, 2020).

Kemudian bagaimana Donald Trump akhirnya bisa melakukan perundingan dengan Taliban dan membuat kesepakatan perdamaian dimulai dari adanya kunjungan dadakan Trump ke pangkalan militer milik Amerika Serikat di Afghanistan dalam rangka memperingati *thanksgiving*, yang merupakan hari libur di Amerika Serikat sebagai bentuk rasa syukur. Pada kunjungan tersebut Trump mengatakan bersedia untuk melanjutkan perundingan perdamaian setelah sebelumnya hubungan antara AS dan Taliban sempat memanas (CNN, 2019). Hingga pada

akhirnya sejarah mencatat tanggal penting dimana perwakilan Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian pada tanggal 29 Februari 2020 setelah berbulan-bulan negosiasi diadakan di Qatar dan ini menandai berakhirnya peperangan. Dalam kasus ini pemerintah Afghanistan akan terlibat dengan Dewan Keamanan PBB untuk menghapus anggota Taliban dari daftar sanksi (Al Jazeera, 2020). Penandatanganan perjanjian ini disambut positif oleh banyak kalangan karena akibat dari konflik yang berlangsung selama hampir dua dekade ini menewaskan banyak orang dan sudah mengeluarkan banyak biaya. Pertemuan di Doha kala itu menghasilkan empat lembar total dari draft perjanjian perdamaian.

Keputusan Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian perdamaian Taliban ini menyita perhatian karena selain masa lalu Amerika Serikat dengan Taliban dan juga karena keputusan ini disetujui oleh Presiden Donald Trump. Padahal Donald Trump merupakan pemimpin yang cukup sensitif dengan isu terorisme ini sendiri. Terbukti dengan keputusan Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif ataupun keputusan presiden yang dikenal dengan "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States.*" (The White House, 2017). Dapat disimpulkan bahwa Donald Trump memang memandang eksistensi terorisme merupakan ancaman yang nyata untuk stabilitas keamanan Amerika Serikat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak diangkat adalah: Mengapa Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan perjanjian damai dengan Taliban dan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan peperangan di Afghanistan serta keterlibatan Amerika Serikat di dalam peperangan tersebut.
2. Mengetahui alasan Presiden Donald Trump menyetujui perjanjian perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.
3. Mengetahui isi perjanjian antara Amerika Serikat dan Taliban serta pemerintahan Afghanistan.

1.4. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif mengenai latar belakang dari adanya perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Taliban yang mengakhiri perseteruan selama dua dekade di

masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa perjanjian perdamaian antara dua belah pihak dapat terjadi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan analisis kebijakan luar negeri, khususnya untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk menelaah secara terperinci perumusan masalah dalam penelitian terkait kebijakan Amerika Serikat untuk berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan maka penulis menggunakan teori realisme neoklasik untuk menganalisis lebih lanjut. Dengan teori ini penulis akan menjelaskan faktor pendorong Amerika Serikat memilih kebijakan tersebut.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas terkait kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan terkhususnya Taliban:

Skripsi milik Inayah Sasi Kirana dalam tulisannya yang berjudul “Analisa Penarikan Mundur Pasukan Amerika Serikat Di Afghanistan Tahun 2018.” yang terbit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan. Lebih spesifiknya membahas penarikan 5.400 pasukan setelah adanya dialog antara Amerika Serikat dan Taliban di tahun 2018. Penelitian tersebut memuat alasan

Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, karena dengan begitu Amerika Serikat dapat mengefisiensi biaya militernya di Afghanistan (Kirana, 2019). Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibawakan penulis adalah, penelitian ini akan membahas juga terkait perjanjian perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh Amerika Serikat dan Taliban serta keberlanjutan penarikan pasukan di tahun 2020 oleh Presiden Donald Trump.

Selanjutnya penelitian milik Marza Nanda Aldinata yang berjudul "Faktor Internasional Sebagai Latarbelakang Kebijakan Amerika Serikat dalam Penangguhan Penarikan pasukan Militer Di Afghanistan Tahun 2014-2016" yang terbit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2018. yang membahas alasan mengapa Amerika Serikat melakukan penangguha penarikan pasukan militernya dari Afghanistan. Adapun penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama menangguhkan penarikan pasukan karena sebelumnya sudah terjadi adanya kebangkitan Taliban dan Al-Qaeda sehingga mengancam keamanan Afghanistan, sehingga Presiden Afghanistan Ashraf Ghani membujuk Obama untuk melakukan penarikan pasukan secara fleksibel dan berakhir dengan terciptanya *Bilateral Security Agreement* yang mana mengatur masalah kelanjutan keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu termasuk pasukan militer di dalamnya (Aldinata, 2018). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis bawakan karena tentunya sudah membahas kebijakan di era Presiden yang berbeda.

Penelitian milik Anisa Yulianty yang berjudul "Strategi Taliban Dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat Pasca Jatuhnya Rezim Taliban Di Afghanistan

(2007-2013).” yang merupakan hasil skripsi di UPN Veteran Jakarta pada tahun 2015, membahas mengenai sudut pandang Taliban dalam menghadapi Amerika Serikat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Taliban memiliki banyak strategi seperti strategi jaringan, memperhatikan aspek politik, dan strategi lainnya yang didominasi oleh strategi yang bersifat koersif. Berbagai macam strategi dan taktik yang dimiliki oleh Taliban tersebut dianggap dapat mengimbangi lawannya malah membuat kewalahan Amerika Serikat dan pasukan asing lainnya (Yulianty, 2015).

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan seperti di bagian penggunaan teori, fokus pembahasan, dan ruang lingkup pembahasan yang berbeda.

1.5.1 Realisme Neoklasik

Dalam menganalisa fenomena Hubungan Internasional, Realisme merupakan teori yang sangat populer dan banyak digunakan. Salah satu dari aliran realisme adalah Realisme Neoklasik. Realisme Neoklasik merupakan aliran yang berasosiasi dengan teori Realisme. Realisme neoklasik sendiri merupakan teori hubungan internasional yang lebih spesifik berupaya menggabungkan elemen-elemen neorealisme dan realisme klasik. Realisme neoklasik sendiri merupakan teori yang lebih fokus terhadap kebijakan luar negeri. Agar dapat memahami perilaku negara di pentas internasional, teori ini memasukkan variable struktur-anarki dan distribusi kapabilitas dan variable unit faktor-faktor domestik negara. Teori ini percaya bahwa struktur internasional merupakan *driving force* perilaku negara. Tetapi hanya mengacu pada satu struktur saja tidak cukup sebab tidak semua negara berperilaku seragam. Variasi kebijakan luar negeri terjadi karena setiap negara memiliki respon

yang beragam terhadap *structure constraint* (Rosyidin, 2020, p. 35). Teori Realisme neoklasik mempermasalahkan bahwa negara tidak membentuk kebijakan luar negeri melainkan pemerintah dan para birokrat yang menyusun kebijakan tersebut (Schweller, 2006, p. 47). Secara historis, Realisme neoklasik berkembang melalui tiga tahapan. Tipe I dimana realism neoklasik menjelaskan kesalahan historis dimana penggerak secara struktural gagal menghasilkan kebijakan yang sesuai. Kemudian dilanjutkan ke Tipe II yang mulai mengembangkan pernyataan teoritis yang lebih abstrak dan dapat digeneralisasikan tentang kebijakan luar negeri. Tipe ini berpendapat bahwa struktur yang menginformasikan dan membatasi pilihan strategis suatu negara itu sendiri dibentuk oleh pilihan strategis negara. Selanjutnya tipe III realisme neoklasik ini merupakan pembesaran realism structural melalui kebijakan luar negeri, untuk menentang realism struktural sebagai teori politik internasional. Intinya tipe III ini menolak pendapat Waltz yang menyatakan bahwa realisme struktural bukanlah teori kebijakan luar negeri (Kitchen, 2020, p. 11). Schweller menyebutkan asal dari realisme neoklasik adalah ‘teori kesalahan’, realism neoklasik telah membangun dirinya sebagai teori kebijakan luar negeri yang berusaha menjelaskan pilihan strategis negara. Berangkat dari wawasan awalnya, bahwa faktor-faktor tingkat domestik mengintervensi antara pendorong eksternal dan respons strategis, menyoroti batasan pilihan yang dihadapi oleh eksekutif kebijakan luar negeri ketika bereaksi terhadap insentif struktural (Schweller, 2006, p. 10).

Realisme neoklasik merupakan *grand theory* yang mengusulkan pendekatan dari luar ke dalam. Dalam mengambil strategi realisme neoklasik biasanya mengambil

keputusan dengan melakukan survey lingkungan geostrategis, memperhatikan situasi negara mereka sendiri, musuh-musuhnya, sekutu dan pihak ketiga dan kemungkinan tanggapan para aktor lain. Selain itu untuk membuat keputusan biasanya mengesampingkan kekhawatiran tentang bagaimana memobilisasi dan mempertahankan dukungan domestik. Pemerintah memiliki sifat yang otonom dimana dalam pengambilan keputusan dapat secara independen terhadap kelompok dan juga tekanan domestik. Untuk membuat keputusan juga harus memobilisasi sumber daya dengan efisien dengan meyakinkan audiens domestik yang relevan untuk mendukung rencana mereka. Meskipun sektor domestik dan internasional sama-sama penting dalam Realisme neoklasik, teori ini menganggap apabila dalam sebuah permainan catur, satu internasional dan yang lain domestik maka langkah pertama dibuat enggan mempertimbangkan langkah papan internasional (Onea, 2020, p. 9)

Arus utama dari realisme neoklasik didasari dari wawasan asumsi neorealisme dan realisme klasik. Kebanyakan para penganut realisme neoklasik mengidentifikasi pola yang dapat diamati dari perilaku eksternal suatu negara, menganalisis pola-pola dengan latar belakang prediksi neorealis, misalnya penyeimbangan kekuatan defensif atau pencarian hegemoni ofensif dan berusaha menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri. Biasanya para penganut realisme neoklasik menggunakan variabel perantara yang berbeda untuk menerjemahkan rangsangan sistemik ke dalam keputusan kebijakan luar negeri dan perilaku negara. Variabel-variabel yang digunakan nantinya dapat mempengaruhi pilihan negara dan ruang lingkup tindakan dalam situasi yang

konkret. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi variabel perantara mana yang penting, kapan dan bagaimana faktor sistemik, domestik dan kognitif yang terkait dalam rantai kausal membentuk dan mendorong kebijakan luar negeri. Dengan adanya variabel perantara itulah realisme neoklasik dapat menjelaskan variasi dalam perilaku suatu negara (Reichwein, 2012, pp. 35-36).

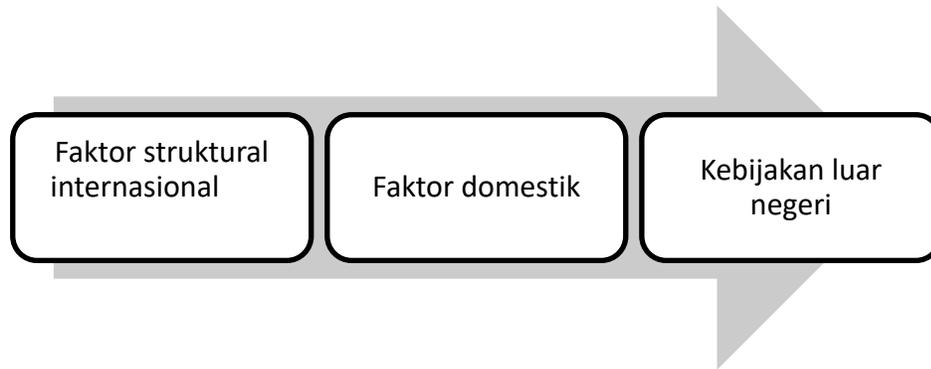
Teori Realisme neoklasik ini akan menggabungkan komponen domestik internal dan lingkungan eksternal. Dalam jurnal milik Gideon Rose menjelaskan bahwa negara merupakan aktor yang rasional dalam hubungan internasional dimana dalam menghasilkan kebijakan luar negerinya selalu memperhatikan pertimbangan dan tujuan yang jelas akan kebijakan yang akan diambil. Maksudnya apa saja dampak serta keuntungan negara yang didapatkan saat membuat keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik sebelumnya. Rose menambahkan lagi bahwa apabila hendak menganalisis Kebijakan luar negeri dapat dianalisis dengan melihat bagaimana sistem internasional yang berlaku dan melihat bagaimana sistem internasional itu berimplikasi terhadap suatu negara yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku negara tersebut. Para penganut realisme lainnya setuju dengan pendapat tersebut dan menambahkan bahwa ambisi dan ruang lingkup kebijakan luar negeri itu ditentukan oleh posisi negara dalam sistem internasionalnya serta kekuatan materi relatif atau kapabilitas seperti di bidang ekonomi, sosial, sumber daya alam dan militer dari suatu negara. Dari adanya kapabilitas atau materi relatif seperti ekonomi, sosial, sumber daya alam dan juga militer tersebut menghasilkan dampak yang tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri yang

menjadikannya jauh lebih kompleks untuk dianalisis karena pada dasarnya kebijakan luar negeri harus dianalisis dengan memperhatikan variable tingkat unit yaitu persepsi pembuat keputusan negara, seperti Presiden, dan petinggi negara lainnya. Dilanjutkan lagi bahwa kebijakan luar negeri selain didasari oleh persepsi pembuat kebijakan juga didasari dari adanya variabel penghubungnya yaitu bagaimana hubungan negara tersebut dengan negara lainnya. Hal tersebut menjadi pertimbangan pembuat kebijakan untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Maka dari itu untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan harus melakukan pemeriksaan yang teliti tentang bagaimana posisi negara dalam konteks internasional namun tidak bisa melupakan faktor domestiknya . (Rose, 1998, pp. 146-147) Kemudian faktor internal ataupun faktor domestik perlu disertakan untuk melihat bagaimana pandangan suatu negara dalam melihat lingkungan eksternalnya (Rathbun, 2008, p. 312). Pemikiran ini kemudian di dukung oleh Fareed Zakaria dimana ia berfokus pada kebijakan yang dipengaruhi oleh domestik dan menyatakan bahwa persepsi elit politik terkait faktor domestik serta adanya pendapat dan pengaruh dari kelompok masyarakat merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan (Zakaria, 1992, pp. 177-198).

Teori ini juga merupakan teori multi-level analisis yang menggabungkan antara faktor internasioanl dan faktor domestik untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri (Ford, 2009, p. 9). Teori ini sebagai jembatan antara sistem internasional dan faktor domestik. Lebih spesifiknya, realisme neoklasik merupakan teori yang mempertimbangkan juga faktor-faktor yang bersifat non-struktural seperti bagaimana

karakter dari seorang pemimpin elit maupun tanggapan publik terhadap kebijakan luar negeri yang diambil negaranya (Rustam, 2014).

Gambar 1.1
Model penjelasan Realisme Neoklasik



Sumber: (Lobell, Ripsman, & Taliaferro, 2009, p. 4)

Teori Realisme Neoklasik ini merupakan teori yang akan menjelaskan mengapa, bagaimana dan dalam kondisi yang seperti apa suatu negara mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut realisme neoklasik meyakini jawabannya ada pada karakter domestik negara yang bersangkutan dalam menanggapi tekanan dari sistem internasional. Adapun karkter domestik yang dimaksud adalah kapasitas lembaga politik militer, pengaruh aktor-aktor domestik dan kelompok kepentingan, derajat otonomi negara dari masyarakatnya dan tingkat kohesi elit atau masyarakat. Steven E Lobell menyebutkan bahwa pada dasarnya antara satu negara dan negara lainnya memiliki tujuan jangka panjang yang sama dalam politik internasional seperti keamanan nasional yang ingin dicapai untuk negaranya. Namun, dalam jangka pendek, kebijakan suatu negara

untuk mengejar tujuannya memiliki perbedaan dan tidak selalu sama yang menjadikan hal ini sulit untuk dianalisis secara sistematis . Realisme neoklasik mengasumsikan bahwa politik merupakan suatu perjuangan yang dilakukan terus-menerus di antara berbagai negara demi mendapatkan kekuasaan dan keamanan secara material di dunia dengan sumber daya yang langka dan ketidakpastian yang meluas. (Lobell, Ripsman, & Taliaferro, 2009, p. 4).

Kondisi anarki yakni keadaan dimana tidak adanya kedaulatan universal atau pemerintahan di seluruh dunia menjadi penyebab permisif dari terjadinya konflik internasional. Maksudnya adalah karena keadaan yang anarki tersebut maka negara-negara harus melakukan penyesuaian dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga dengan kondisi yang anarki ini, memberi kesulitan untuk dapat mengetahui niat dan menilai kekuasaan negara-negara lain .Dengan adanya asumsi tersebut, membuat para penganut realisme neoklasik terbagi menjadi dua. Di satu sisi asumsi tersebut membuat pandangan tentang anarki dan distribusi kekuasaan malah mendorong negara untuk meningkatkan kekuasaan. Di sisi lain, negara tidak perlu memperbesar *power* jika tidak merasa terancam. Maka ditengah kondisi sistem internasional yang anarki, negara harus memilih apakah akan bertahan dengan memperbesar *power* agar tidak terancam atau meningkatkan kekuasaannya.

Sebagai unit level yang penting dalam teori realisme neoklasik, Perhitungan dan persepsi para pemimpin menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat keberlangsungan kebijakan luar negeri yang akan datang dan juga berpengaruh pada respon lingkungan eksternalnya. Pemimpin selalu dianggap sedang menghadapi

permainan dua tingkat dimana satunya mereka harus menanggapi lingkungan eksternal, tetapi di sisi lain mereka juga harus mengekstraksi dan memobilisasi sumber daya dari masyarakat domestik, bekerja dengan institusi domestik yang ada dan mempertahankan dukungan dari para *stakeholder* (Lobell, Ripsman, & Taliaferro, 2009, p. 7). Maka dalam teori realisme neolasik ini, pemimpin atau pembuat kebijakan harus melakukan pertimbangan yang seimbang antara kondisi internal dan eksternalnya sebelum memutuskan kebijakan luar negerinya. Dalam buku tersebut juga menyebutkan bahwa realisme neoklasik mengidentifikasi negara sebagai aktor terpenting dalam politik internasional. Teori ini juga menghadirkan konsep “top down” tentang negara yang berarti kekuatan sistemik pada akhirnya mendorong perilaku eksternal. Untuk tujuan ini, realisme neoklasik memandang negara-negara bagian yang dilambangkan oleh eksekutif keamanan nasional, yang terdiri dari kepala pemerintahan dan para menteri serta pejabat yang ditugasi membuat kebijakan keamanan luar negeri.

Teori realisme neoklasik pada hakikatnya merupakan teori yang mengembangkan kembali pemikiran dari para penganut teori realisme klasik, yakni pemikiran milik Machiavelli, Tuchydidies, E.H. Carran juga Morgenthau. Teori ini juga mengkritik teori dari Neorealiseme yang mana teori tersebut membahas tentang politik internasional, bukan teori politik luar negeri telah gagal dalam menjelaskan perilaku negara secara individual. (Waltz, 1979). Neorealisme hanya memperdulikan struktur interasional sebagai variable independennya dan hanya mementingkan interaksi antar negara. Lebih lanjut Taliafero menjelaskan perbedaan antara Neorealisme dan

realisme neoklasik dimana neorealisme berusaha untuk menjelaskan luaran fenomena internasional, seperti adanya kemungkinan perang besar, prospek dari dari tiap-tiap negara (Taliafero, 2000). Maka disini Taliafero menekan perbedaan antara neorealisme dengan realisme neoklasik adalah dalam hal dependen variabel atau fenomena yang ingin dijelaskan. Realisme neoklasik merupakan teori yang mengintegrasikan analisisnya pada tingkat unit dan juga struktur. Sebenarnya dua hal tersebut adalah bawaan dari teori realisme lainnya yakni realisme klasik yang mempertimbangkan analisa tingkat unit dan neorealisme yang mempertimbangkan analisa struktur, dan kemudian disatukan oleh realisme neoklasik untuk menjelaskan politik luar negeri. Pada dasarnya realisme klasik memang mementingkan adanya sumber dan penggunaan *national power* di dalam politik internasional. Tetapi sama halnya dengan neorealisme, percaya bahwa lingkungan internasional dimana negara berinteraksi merupakan hal yang paling utama dari adanya kepentingan dan perilaku negara. Kedua ide pokok dari dua teori realisme itu disatukan oleh realisme neoklasik karena dianggap lebih memadai untuk memahami bagaimana perilaku suatu negara di arena internasional (Taliaferro, 2006).

Maka untuk menjelaskan serta mengetahui alasan dari kebijakan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di masa kepemimpinan Donald Trump ini, penulis menggunakan teori neoklasik realisme sebagai kerangka pemikiran selama melakukan penelitian. Dengan menggunakan teori realisme neoklasik ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat bersedia berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan. Seperti yang dijelaskan di

atas, dengan mengetahui faktor struktur internasional dan faktor domestik maka melahirkan kebijakan luar negeri. Sehingga untuk menganalisis diperlukan data-data mengenai situasi eksternal dan situasi internal agar dapat menjawab rumusan masalah

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

a. Invasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengarahkan angkatan bersenjata yang bermaksud menyerang atau menguasai negara tersebut ataupun melakukan penyerbuan ke dalam teritorial negara lain. Kemudian berdasarkan *Cambridge English Dictionaries*, Invasi merupakan suatu kesempatan ketika tentara ataupun negara menggunakan kekuatan untuk memasuki dan menguasai negara lain. Pengertian lainnya invasi adalah suatu peristiwa ketika banyak orang atau sesuatu datang ke suatu tempat dengan cara yang mengganggu dan tidak diinginkan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa invasi merupakan tindakan suatu negara memasuki negara lain dengan melibatkan tentara dengan tujuan tertentu.

b. Perdamaian

Menurut Johan Galtung suatu keadaan disebut damai adalah ketika dimana situasi tanpa adanya kekerasan yang tidak hanya bersifat personal atau langsung melainkan juga bersifat struktural atau tidak langsung, Galtung juga memaparkan

bahwa kondisi damai ialah ketika tidak danya kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat. Galtung juga menjelaskan tentang pendekatannya terkait perdamaian atau *negative peace* yang menghendaki tidak terjadi adanya perang dengan kekuatan militer dan efek dari penggetarnya (*deterrence*) atau dapat juga diisitilahkan dengan damai karena kuat dan adgaium terkenal lainnya adalah jika ingin damai siapkan perang. Umumnya pendekatan *negative peace* ini bersifat koersif dan reaktif (Galtung, 1969, p. 183). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Damai memiliki makna sebagai suatu keadaan dimana tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, berbaik kembali dan adanya suasana tentram. Perdamaian adalah unsur kesenjangan untuk berbuat dan melakukan sesuatu, yakni membuat supaya keadaan aman, tidak berseteru ataupun bermusuhan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah keadaan dimana tidak adanya kekerasan ataupun konflik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

c. Terorisme

Dewan Keamanan PBB mendefinisikan Terorisme sebagai tindakan kriminal termasuk terhadap warga sipil yang dilakukan dengan maksud mencelakai, menyebabkan kematian ataupun cedera tubuh yang serius atau mengambil sandera dengan tujuan memprovokasi keadaan teror di masyarakat umum atau orang-orang tertentu, mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun (United Nations Security Council Resolution No. 1566 Tahun 2004). Selanjutnya menurut seorang ahli bernama Henry Campbell Black, terorisme dimaksudkan untuk

mengancam, melakukan tindak menggertak, menakut-nakuti untuk mempengaruhi penduduk sipil, mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan hingga pembunuhan (Black, 1990). Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita simpulkan pengertian terorisme yaitu suatu aksi kriminal yang bermaksud mengintimidasi hingga mencelakai masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

1.6.2 Definisi Operasional

a. Invasi

Dalam operasionalisasi invasi dalam penelitian ini yaitu tindakan memasuki wilayah dan mengarahkan angkatan bersenjata ke suatu Negara. Invasi dalam penelitian ini merupakan tindakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penelitian ini merupakan imbas dari tragedi 9/11 dimana Amerika Serikat memiliki agenda *war on terror* untuk melawan kelompok terorisme yang diyakini berada di Afghanistan.

b. Perdamaian

Pada penelitian ini perdamaian dimaksudkan sebagai keadaan dimana tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, baik kembali dan adanya suasana tentram. Dalam penelitian ini hendak membahas perdamaian yang diupayakan oleh Amerika Serikat dan Taliban. Setelah bertahun-tahun berperang di

tanah Afghanistan dengan Taliban, Amerika Serikat mulai memutuskan untuk berdamai dengan Taliban.

c. Terorisme

Dalam operasionalisasi terorisme penelitian ini yakni kelompok terorisme yang menyerang warga sipil dengan tujuan tertentu menggunakan metode kekerasan. Terorisme juga dapat diartikan sebagai tindakan yang memiliki motif politik dan menyebarkan ketakutan pada masyarakat. Dalam penelitian ini terorisme dimaksudkan untuk menjelaskan agenda Amerika Serikat di Afghanistan. Setelah tragedi 9/11 Amerika Serikat sangat awas dengan terorisme yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional Amerika Serikat sehingga mereka melakukan invasi untuk menumpas terorisme.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa faktor yang mendorong Amerika Serikat menyetujui perjanjian perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan karena adanya dorongan dari sistem internasional dimana terdapat ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap NATO yang cenderung merugikan Amerika Serikat. Adanya hubungan yang kurang harmonis ini kemudian mempengaruhi perspektif domestik yakni Presiden Donald Trump yang memandang hubungan Amerika Serikat dan NATO ini tidak sesuai dengan prinsip 'America First'nya. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong Amerika Serikat bersedia berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan sebagai bentuk penyelesaian

konflik di Afghanistan yang mana menjadi perang terlama Amerika Serikat. Konflik yang juga melibatkan kontribusi NATO ini tidak menemukan titik terang selama hampir dua dekade sehingga Amerika Serikat harus menentukan strategi lainnya untuk bisa lepas dari Afghanistan dan lebih fokus untuk membangun Amerika Serikat.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan ialah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut digunakan karena dapat menjabarkan dengan menyeluruh terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan khususnya untuk Taliban.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini tergolong penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan terkait pertanyaan mengapa sesuatu terjadi (Sarwono, 2006:193). Disini penulis menggunakan studi kasus Perjanjian Perdamaian yang disetujui oleh Amerika Serikat dan Taliban serta penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Penulis akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perjanjian perdamaian dan penarikan pasukan tersebut di era kepemimpinan Donald Trump.

1.8.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan luar negeri Amerika

Serikat khususnya mengenai perjanjian damai dengan Taliban dan penarikan pasukannya dari Afghanistan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yakni negara Amerika Serikat dan Taliban sebagai pihak yang bertikai dengan Amerika Serikat.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data yang akan digunakan merupakan data dalam bentuk frasa ataupun kata – kata yang tertulis. Dengan data kualitatif akan menjabarkan penjelasan terkait perumusan masalah yang akan diteliti. Dari jenis data tersebut, data yang digunakan ialah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan kajian pustaka yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis (Sugiyono, 2016: 225).

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan studi Hubungan Internasional dan juga majalah ataupun surat kabar yang terdapat di situs internet yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan studi pustaka, yang mana penulis akan mengumpulkan data yang bersumber dari riset terdahulu, buku-buku yang terkait, dan situs-situ berita yang dapat memberikan informasi aktual terkait perkembangan kasus yang diangkat oleh penulis. Disamping itu, penulis melakukan

online research untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hubungan antara Afghanistan, Taliban dan juga Amerika Serikat.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti akan menganalisis dengan menjabarkan data-data yang valid terkait pertikaian antara Amerika Serikat dan Taliban dan keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan. Data yang ada kemudian akan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah yang ada. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan metode kongruen ataupun metode sebangun. Metode kongruen merupakan metode yang melakukan pencocokan antara teori dan data. Berangkat dari teori yang ditentukan kemudian menguji dalam menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Maka dari itu metode ini memfokuskan kepada logika sebab-akibat yang terdapat di dalam premis teori yang digunakan (George & Bennet, 2005). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori realisme neoklasik sebagai variabel independen dan juga sebagai filter data terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukan dari Afghanistan.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan analisis menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan yakni realisme neoklasik dimana data yang didapat dari objek penelitian diuji kredibilitas dan orisinalitas menggunakan teori tersebut. Dalam penelitian ini akan mengamati kilas balik sejarah

invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, kebijakan tiap-tiap Presiden AS terhadap Afghanistan khususnya Taliban setelah tragedi 9/11 dan penjabaran lebih lanjut tentang proses negosiasi yang menghasilkan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban.